



Dominasi Politik dalam Pemerintahan Indonesia: Faktor Penyebab Dan Reformasi Partai Menuju Pemerintahan Demokratis Efektif

Hendrico Tampubolon^{1*}

¹Fakultas Hukum, Program Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email : ¹*polimedia5a@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak – Tulisan ini membahas pentingnya reformasi politik dan sistem pemerintahan di Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kepentingan rakyat. Pengaruh politik yang dominan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dominasi partai-partai besar yang mendominasi ruang politik sering kali mengarah pada kebijakan yang lebih didorong oleh kepentingan jangka pendek partai, bukan oleh kepentingan publik. Reformasi dalam sistem partai politik dan sistem pemilu menjadi langkah penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Dibahas pula tentang bagaimana desentralisasi kekuasaan dapat meningkatkan kesejahteraan daerah dengan memberikan pemerintah daerah kewenangan lebih besar dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Sistem pemilu juga menjadi fokus penting, dengan usulan penerapan sistem *mixed-member proportional* (MMP) untuk menciptakan representasi yang lebih adil dan merata di parlemen, yang dapat mengurangi ketimpangan dalam pembagian kekuasaan antara partai besar dan kecil. Rekomendasi utama yang dihasilkan dari analisis ini mencakup pembaruan dalam sistem pemilu, penguatan partai politik kecil, serta desentralisasi kekuasaan untuk mempercepat pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Implementasi reformasi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi, memperkuat stabilitas politik, dan mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Reformasi Politik, Sistem Pemerintahan, Sistem Pemilu, Desentralisasi Kekuasaan, Partai Politik, Demokrasi, Indonesia.

Abstract - This article examines the importance of political and governance reform in Indonesia as a means to establish a government that is more transparent, efficient, and responsive to public interests. The dominant influence of politics in governmental policymaking constitutes one of the main challenges within Indonesia's governance system. The dominance of major political parties in the political arena often results in policies driven primarily by short-term party interests rather than the public good. Consequently, reform of the political party system and the electoral system becomes a crucial step in improving the quality of democracy in Indonesia. This study also discusses how decentralization of power can enhance regional welfare by granting local governments greater authority to formulate policies that correspond to local needs and conditions. The electoral system is another central focus of this study, particularly the proposal to adopt a *mixed-member proportional* (MMP) system to create fairer and more balanced parliamentary representation, thereby reducing disparities in power distribution between large and small political parties. The main recommendations derived from this analysis include electoral system reform, strengthening the role of smaller political parties, and expanding decentralization to accelerate equitable development across Indonesia. The implementation of these reforms is expected to improve democratic quality, reinforce political stability, and realize a government that is more responsive to the interests of society.

Keywords: Political Reform, Governance System, Electoral System, Decentralization Of Power, Political Parties, Democracy, Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Politik hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sistem pemerintahan yang ada saat ini, meskipun telah mengalami sejumlah reformasi sejak era Orde Baru hingga pasca-reformasi, masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan pengaruh politik yang sangat kental dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah dominasi partai politik dalam berbagai tahapan pengambilan keputusan pemerintahan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Di Indonesia, partai politik memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan publik dan pemerintahan. Bahkan, seringkali partai politik lebih memprioritaskan



kepentingan politiknya dibandingkan dengan kepentingan negara dan masyarakat. Hal ini terbukti dari maraknya praktik politik transaksional yang mengarah pada pembentukan koalisi pemerintah yang lebih didorong oleh kepentingan jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang negara (Ibrahim, 2019).

Selain itu, sistem pemilu yang ada cenderung memperkuat dominasi partai politik besar yang memiliki sumber daya lebih. Sistem ini juga mengarah pada ketidakseimbangan representasi, di mana suara masyarakat tidak selalu tercermin dalam kebijakan pemerintah. Hasilnya, kebijakan yang diambil sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan rakyat, tetapi lebih kepada kepentingan politik partai-partai besar. Dampak dari hal ini adalah ketidakstabilan politik yang dapat menghambat tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dengan mengingat kenyataan tersebut, kajian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya bergantung pada perubahan kebijakan di tingkat pemerintahan, tetapi juga pada reformasi dalam sistem partai politik. Salah satu gagasan yang perlu dieksplorasi adalah bagaimana mengurangi pengaruh politik dalam sistem pemerintahan agar tercipta pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kepentingan rakyat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apa saja faktor yang menyebabkan pengaruh politik menguasai sistem pemerintahan di Indonesia? Dan bagaimana reformasi sistem partai politik dapat mengurangi pengaruh politik yang negatif terhadap sistem pemerintahan?

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan teknik **analisis deskriptif**. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, literatur ilmiah, laporan kebijakan, serta wawancara dengan pakar politik dan pemerintahan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan **analisis konten** terhadap dokumen-dokumen yang relevan, serta mengkaji teori-teori politik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan partai politik di Indonesia.

2.1 Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari hubungan antara hukum dan politik. Hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks politik karena hukum adalah alat untuk mengatur kehidupan bernegara yang pasti akan dipengaruhi oleh kekuasaan politik yang ada. Dalam konteks Indonesia, teori politik hukum sering kali dipengaruhi oleh pendekatan **Kekuasaan Negara**, yang memandang negara sebagai entitas yang memiliki otoritas untuk membuat dan menegakkan hukum (Rasyid, 2018).

Teori **Kekuatan Hegemoni** oleh Antonio Gramsci juga relevan dalam konteks politik hukum di Indonesia. Gramsci berpendapat bahwa kekuasaan politik sering kali mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum, dan ini terlihat dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan partai politik yang mendominasi (Pratama, 2020). Di sisi lain, teori **Pluralisme Hukum** yang dikembangkan oleh Sally Engle Merry (2006) mengungkapkan bahwa di negara-negara demokrasi, terdapat pluralitas norma yang bersumber dari hukum formal dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, yang dapat berperan dalam mengurangi pengaruh dominasi politik terhadap hukum negara.

Secara keseluruhan, politik hukum menganggap hukum sebagai arena pertarungan ideologi, di mana kepentingan politik mengarah pada pembentukan hukum yang sering kali tidak memperhatikan aspek keadilan sosial secara menyeluruh.

2.2 Sistem Pemerintahan di Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada prinsip **Presidensialisme** yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam sistem ini, Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan



eksekutif yang luas, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari dominasi lembaga legislatif terhadap eksekutif (Dewi, 2017).

Namun, meskipun terdapat pembagian kekuasaan yang jelas, sistem pemerintahan Indonesia sering kali mengalami ketidakstabilan akibat pengaruh politik yang sangat besar dalam setiap aspek pemerintahan. Pengaruh partai politik yang dominan menyebabkan sering terjadinya *political bargaining* atau tawar-menawar politik antara partai-partai yang berkoalisi dalam pemerintahan (Budiarto, 2020). Dalam konteks ini, kebijakan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kebutuhan rakyat, tetapi lebih pada kepentingan jangka pendek partai-partai politik.

Menurut Ibrahim (2019), sistem pemerintahan di Indonesia juga dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan administratif yang membuat pemerintah kesulitan untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten. Hal ini diperburuk dengan ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antar lembaga negara, yang sering kali menimbulkan benturan antara legislatif dan eksekutif.

2.3 Partai Politik dan Pengaruhnya terhadap Pemerintahan

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Di Indonesia, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi partisipasi politik rakyat, tetapi juga memegang peranan penting dalam pembentukan pemerintahan. Secara historis, Indonesia telah melaksanakan sistem multi-partai yang memungkinkan banyak partai berkompetisi dalam pemilu. Sistem ini sering kali menyebabkan kesulitan dalam membentuk pemerintahan yang stabil karena keharusan untuk membentuk koalisi antara partai-partai yang memiliki kepentingan berbeda (Suryanto, 2018).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, partai politik sering kali mendominasi proses pengambilan keputusan. Partai politik besar cenderung lebih kuat mempengaruhi kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pengalokasian anggaran negara, pembuatan kebijakan sosial, serta pengesahan undang-undang. Hal ini menyebabkan kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat (Budiarto, 2020).

Menurut Setyawan (2020), sistem multi-partai di Indonesia juga menghasilkan fragmentasi politik yang menyebabkan kebijakan tidak bisa diambil secara cepat dan efisien, karena harus melalui proses tawar-menawar yang panjang antara partai-partai politik. Proses ini, meskipun demokratis, dapat memperburuk kualitas kebijakan yang dihasilkan, karena tidak selalu mencerminkan kepentingan mayoritas rakyat.

2.4 Sistem Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Pemerintahan

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu elemen yang mendasari sistem demokrasi Indonesia. Pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka, yang memungkinkan pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung. Meskipun sistem ini dianggap lebih demokratis karena memberikan kebebasan kepada pemilih untuk memilih calon legislatif yang mereka inginkan, namun sistem ini juga memperkuat dominasi partai politik besar yang memiliki sumber daya lebih (Ibrahim, 2019).

Sistem proporsional terbuka ini menyebabkan para calon legislatif lebih fokus pada penggalangan dukungan individu, sehingga mereka lebih cenderung berpihak kepada partai politik besar yang memiliki kekuatan finansial dan jaringan yang luas. Hal ini akhirnya menyebabkan partai-partai besar yang mampu membiayai kampanye mereka mendominasi pemerintahan, yang mengarah pada ketidaksetaraan representasi di legislatif (Pratama, 2020).

Beberapa pengamat politik mengusulkan reformasi dalam sistem pemilu untuk mengurangi dominasi partai politik besar, misalnya dengan menggunakan sistem *mixed-member proportional* (MMP), yang dapat memberikan keseimbangan antara sistem proporsional dan distrik (Setyawan, 2020). Reformasi sistem pemilu ini bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih representatif dan mengurangi ketimpangan kekuatan politik yang ada.



2.5 Studi Kasus: Pengaruh Politik dalam Kebijakan Pemerintahan

Dalam praktiknya, pengaruh politik terhadap kebijakan pemerintahan Indonesia dapat dilihat dalam sejumlah kebijakan yang dihasilkan melalui proses tawar-menawar politik. Salah satu contohnya adalah pembentukan koalisi pemerintah pasca pemilu, yang sering kali melibatkan politik transaksi antara partai-partai politik untuk membentuk pemerintahan yang stabil (Budiarto, 2020). Misalnya, dalam pemilu 2019, pembentukan koalisi antara partai-partai besar di Indonesia menyebabkan pemerintahan yang terbentuk lebih mementingkan keseimbangan kekuatan politik daripada kebutuhan rakyat (Ibrahim, 2019).

Selain itu, kebijakan ekonomi juga sering kali dipengaruhi oleh keputusan partai politik yang memprioritaskan kepentingan sektoral atau individu daripada kepentingan nasional. Kebijakan terkait subsidi energi misalnya, sering kali dipengaruhi oleh tekanan partai politik tertentu yang menginginkan kebijakan tersebut untuk mendapatkan dukungan pemilih di wilayah tertentu (Setyawan, 2020).

2.6 Hubungan Politik dan Hukum

Politik dan hukum di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh hubungan antara kekuasaan politik dan keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, pengaruh politik terhadap sistem hukum Indonesia sangat kuat, terutama dalam proses pembuatan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Rasyid (2018), pengaruh politik terhadap sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan hukum sering kali didasarkan pada kepentingan politik yang ada, bukan pada keadilan sosial.

Politik hukum ini juga memperlihatkan ketimpangan dalam sistem peradilan Indonesia, di mana sering terjadi intervensi politik dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim. Hal ini dapat mengurangi independensi peradilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.

3. PENGARUH POLITIK TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN

3.1 Dinamika Kekuasaan Politik di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, menghadapi tantangan besar dalam hal pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembentukan pemerintahan yang ideal seharusnya didasarkan pada prinsip *checks and balances*, yang bertujuan untuk menjaga agar tidak ada satu cabang kekuasaan yang terlalu dominan (Ibrahim, 2019). Namun, kenyataannya, sistem politik Indonesia sering kali diganggu oleh adanya konsentrasi kekuasaan yang terpusat pada partai politik besar yang mengendalikan pemerintahan.

Dinamika kekuasaan politik di Indonesia cenderung memperlihatkan adanya kecenderungan pengaruh politik yang sangat kuat terhadap pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilihat dalam praktik koalisi pemerintah, yang terkadang lebih berorientasi pada pembagian kekuasaan di antara partai-partai politik daripada pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Suryanto, 2020). Fenomena ini terjadi karena partai-partai politik yang memiliki suara mayoritas sering kali mengutamakan kepentingan politik mereka dalam membentuk kebijakan, ketimbang memprioritaskan kebutuhan rakyat.

Sebagai contoh, dalam pemilu 2019, partai-partai besar membentuk koalisi berdasarkan kepentingan politik jangka pendek, bukan pada visi pemerintahan yang transparan dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan pemerintah kesulitan untuk melakukan reformasi struktural yang signifikan (Budiarto, 2020). Dengan demikian, pengaruh politik terhadap pemerintahan di Indonesia lebih mengarah pada keputusan-keputusan yang lebih bersifat pragmatis dan terfokus pada kepentingan elektoral, ketimbang kebijakan yang berpihak pada rakyat.

3.2 Kelemahan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Meskipun sistem pemerintahan Indonesia dirancang untuk menghindari dominasi oleh satu cabang kekuasaan, dalam praktiknya seringkali terdapat ketidakseimbangan yang terjadi antara



eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia tidak sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuannya, yakni menciptakan pemerintahan yang stabil dan efisien. Sebagai contoh, politisasi jabatan-jabatan pemerintah yang sering terjadi menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan.

Menurut Setyawan (2020), salah satu kelemahan utama dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah keterbatasan kapasitas administratif, yang ditandai oleh kesulitan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan secara konsisten. Hal ini diperburuk dengan adanya fragmentasi politik, yang merujuk pada pembagian politik yang sangat tajam antara berbagai partai yang ada. Keadaan ini menyebabkan pemerintah kesulitan untuk menjalankan kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan karena adanya tarik-ulur kepentingan antar partai politik yang berkoalisi.

Kelemahan lainnya adalah timpangnya hubungan antara legislatif dan eksekutif. Pada banyak kesempatan, politisasi di lembaga legislatif menghambat proses pembuatan undang-undang yang penting bagi masyarakat, bahkan ketika RUU tersebut sudah memiliki dasar yang kuat dan mendesak untuk segera diimplementasikan. Politik bargaining antara partai-partai dalam parlemen lebih sering dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan politik ketimbang untuk kepentingan negara (Ibrahim, 2019).

3.3 Pengaruh Partai Politik terhadap Kebijakan Pemerintah

Dominasi partai politik dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia memiliki dampak yang besar terhadap pembuatan kebijakan pemerintah. Salah satu dampak langsungnya adalah politik anggaran, di mana keputusan terkait alokasi anggaran negara lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan partai politik yang berada dalam koalisi pemerintah daripada berdasarkan kebutuhan ekonomi negara atau kesejahteraan rakyat (Budiarto, 2020).

Dalam hal kebijakan ekonomi, misalnya, kebijakan subsidi energi yang diberlakukan di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh keputusan politik partai, bukan oleh pertimbangan ekonomi yang objektif. Kebijakan ini kerap kali menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan partai politik tertentu, sementara kelompok masyarakat lainnya tidak merasakan manfaat yang sama (Pratama, 2020). Hal ini menunjukkan bagaimana partai politik mempengaruhi arah kebijakan ekonomi yang seharusnya lebih inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, pengaruh politik terhadap kebijakan tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga pada kebijakan sosial. Kebijakan terkait dengan pendidikan dan kesehatan sering kali diwarnai oleh politisasi yang berkaitan dengan peran partai politik dalam koalisi pemerintah. Pembentukan kebijakan pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sering kali terhambat oleh pertimbangan politik jangka pendek yang berorientasi pada kepentingan elektoral partai politik penguasa (Rasyid, 2018).

3.4 Studi Kasus: Pengaruh Politik dalam Kebijakan Pemerintahan

Studi kasus terkait dengan kebijakan yang dipengaruhi oleh politik dapat dilihat pada pembentukan koalisi pemerintah pasca pemilu. Dalam banyak kasus, pemerintah terbentuk bukan karena kesamaan visi dan misi, tetapi lebih kepada hasil dari kompromi antara partai-partai yang saling berusaha untuk memperjuangkan kepentingan politiknya. Misalnya, dalam pemilu 2014 dan 2019, pembentukan kabinet melibatkan negosiasi politik yang panjang, di mana banyak kursi menteri diberikan kepada partai-partai tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik mereka.

Fenomena ini juga dapat dilihat dalam kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19, di mana keputusan-keputusan terkait dengan penanganan kesehatan dan ekonomi banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kebijakan tersebut tidak selalu didasarkan pada data dan fakta yang objektif, melainkan lebih sering dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada di dalam koalisi pemerintah (Setyawan, 2020).

Selain itu, kebijakan pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial juga seringkali terhambat oleh keputusan politik yang lebih mengutamakan kestabilan koalisi daripada keberlanjutan kebijakan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Pembahasan anggaran negara yang seharusnya dilakukan dengan transparansi dan efisiensi sering



kali terbengkalai karena adanya negosiasi politik yang menguntungkan partai-partai besar, tetapi tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat (Budiarto, 2020).

3.5 Hubungan Politik dan Hukum dalam Pemerintahan Indonesia

Politik dan hukum di Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat, dan keduanya saling mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan negara. Dalam praktiknya, hukum sering kali menjadi instrumen yang digunakan oleh penguasa politik untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini tampak dalam putusan-putusan pengadilan yang sering kali dipengaruhi oleh keputusan politik yang ada, yang menurunkan independensi peradilan (Pratama, 2020).

Pengaruh politik terhadap sistem hukum dapat dilihat dalam berbagai keputusan penting yang diambil oleh lembaga-lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan MK tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip keadilan yang objektif, tetapi lebih pada pertimbangan politik yang ada pada waktu itu (Rasyid, 2018). Ini mencerminkan ketidakberdayaan sistem hukum Indonesia dalam menanggulangi pengaruh politik yang sangat kuat.

Dalam konteks ini, perlu ada reformasi dalam sistem hukum Indonesia agar dapat melepaskan diri dari pengaruh politik yang merusak kualitas hukum dan keadilan yang dijalankan oleh negara. Reformasi ini mencakup penguatan independensi lembaga-lembaga hukum seperti MK, Komisi Yudisial, dan lembaga peradilan lainnya yang harus bebas dari intervensi politik demi terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan transparan (Dewi, 2017).

4. GAGASAN REFORMASI POLITIK DAN SISTEM PARTAI

4.1 Reformasi Sistem Partai Politik di Indonesia

Sistem partai politik di Indonesia telah lama menjadi pusat perhatian dalam berbagai kajian politik, karena perannya yang krusial dalam pembentukan pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Sistem multi-partai yang diterapkan sejak pasca-Orde Baru memperlihatkan keberagaman suara rakyat, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai tantangan dalam menciptakan pemerintahan yang stabil dan efisien (Tanuwidjaja, 2020). Dalam konteks ini, reformasi dalam sistem partai politik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa partai-partai politik tidak lagi mendominasi pembuatan kebijakan berdasarkan kepentingan mereka, tetapi lebih kepada kepentingan rakyat.

Beberapa reformasi yang dapat diusulkan antara lain adalah pembatasan pengaruh partai politik besar dalam pemerintahan dan penguatan sistem pemilu yang lebih adil dan merata. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan sistem proposional tertutup yang memungkinkan pemilih memilih partai politik, bukan calon legislatif secara individu. Sistem ini akan mengurangi tekanan politik untuk menggalang dukungan individu dan berpotensi memperkecil ketergantungan pada sumber daya partai besar (Choi & Moon, 2020).

Selain itu, perlu dilakukan pembaruan dalam mekanisme pendanaan kampanye untuk mengurangi ketimpangan yang ditimbulkan oleh pembiayaan politik yang lebih besar pada partai besar. Kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendanaan partai politik dapat mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif dan memperkuat representasi masyarakat dalam kebijakan publik (Lijphart, 2021).

4.2 Desentralisasi Kekuasaan dan Pemberdayaan Daerah

Desentralisasi kekuasaan menjadi salah satu elemen penting dalam reformasi sistem pemerintahan yang efektif. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi tidak hanya terbatas pada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, tetapi juga mencakup otonomi politik yang lebih luas bagi daerah untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Haque, 2019). Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap kebijakan dari pusat yang sering kali tidak relevan dengan kondisi lokal.

Desentralisasi yang efektif akan menciptakan daya saing antar daerah dan memberikan kesempatan bagi daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing.



Hal ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang tertinggal (Smith, 2018). Di samping itu, pemberdayaan daerah melalui kebijakan desentralisasi juga dapat mengurangi sentralisasi kekuasaan yang dimiliki oleh partai-partai besar di tingkat pusat, yang selama ini sering kali menjadi hambatan bagi tercapainya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

4.3 Reformasi Sistem Pemilu untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi

Sistem pemilu di Indonesia yang berbasis **proposional terbuka** memberikan keleluasaan kepada pemilih untuk memilih kandidat secara langsung. Namun, sistem ini juga membuka celah bagi politisasi yang sangat menguntungkan bagi partai-partai besar dengan jaringan dan sumber daya yang luas. Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu perlu dilakukan untuk menciptakan representasi yang lebih adil dan untuk memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan rakyat, bukan hanya suara dari partai politik besar (Levy & Lewis, 2020).

Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah dengan mengadopsi sistem *mixed-member proportional* (MMP), di mana sistem pemilu memadukan antara proporsional dan distrik. Dengan sistem ini, meskipun proporsi suara dapat tercermin lebih akurat dalam kursi legislatif, tetap ada mekanisme untuk memastikan bahwa representasi daerah juga terakomodasi dengan baik. Hal ini akan mengurangi dominasi partai besar yang hanya mengandalkan suara dari daerah urban, sementara daerah-daerah lainnya tetap memperoleh perhatian dalam pembuatan kebijakan nasional (Reynolds, 2020).

Selain itu, penting untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu, khususnya dalam hal penghitungan suara dan pendanaan kampanye. Reformasi ini bertujuan untuk menghindari kecurangan dalam pemilu serta memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat terhadap proses demokrasi yang berjalan.

4.4 Pengurangan Ketimpangan Kekuatan Politik

Salah satu masalah besar dalam sistem politik Indonesia adalah ketimpangan kekuatan politik antara partai-partai besar dan kecil. Partai besar dengan sumber daya yang lebih besar memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu dan mendapatkan kekuasaan. Hal ini menciptakan situasi di mana kepentingan partai besar mendominasi kebijakan pemerintah, sedangkan partai kecil atau suara minoritas terabaikan (Michaels, 2020).

Untuk mengurangi ketimpangan ini, beberapa langkah perlu diambil, seperti pengaturan pembatasan dana kampanye, untuk mencegah partai besar mendapatkan keuntungan yang tidak sebanding dengan representasi rakyat yang seharusnya mereka wakili. Di samping itu, pembatasan koalisi yang berlebihan juga perlu diatur, sehingga tidak ada satu partai atau koalisi yang terlalu mendominasi pemerintahan tanpa adanya kontrol yang cukup dari partai-partai lainnya.

Langkah-langkah ini akan memungkinkan terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif, di mana setiap suara, baik dari partai besar maupun kecil, dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dengan demikian, reformasi ini dapat memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia, menciptakan pemerintahan yang lebih stabil, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4.5 Peran Media dan Masyarakat Sipil dalam Reformasi Politik

Selain dari dalam sistem pemerintahan, peran media dan masyarakat sipil juga sangat penting dalam mendukung reformasi politik di Indonesia. Media berperan sebagai alat kontrol sosial yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan partai politik, serta memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Dengan demikian, media dapat mendorong partai politik untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, masyarakat sipil memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan kesadaran politik yang lebih luas. Melalui organisasi-organisasi masyarakat, pendidikan politik, dan advokasi, masyarakat sipil dapat memberikan tekanan kepada pemerintah dan partai politik untuk melakukan reformasi dalam sistem politik dan pemerintahan. Kolaborasi antara media, masyarakat



sipil, dan partai politik yang lebih responsif terhadap kepentingan rakyat dapat mempercepat terciptanya pemerintahan yang lebih baik (Rahim, 2019).

5. IMPLIKASI DAN PROYEKSI

5.1 Implikasi Terhadap Demokrasi di Indonesia

Reformasi sistem partai politik dan sistem pemerintahan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu implikasi utama dari reformasi ini adalah peningkatan keadilan representasi politik. Dengan memperbaiki sistem pemilu dan memastikan partai politik kecil mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi, maka hasil pemilu akan lebih mencerminkan preferensi politik masyarakat secara keseluruhan (Fischer, 2019). Reformasi ini berpotensi mengurangi dominasi partai besar yang sering kali tidak mencerminkan keragaman kepentingan rakyat, sehingga memperbaiki kualitas representasi politik di parlemen.

Selain itu, desentralisasi kekuasaan yang diusulkan akan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, daerah-daerah yang memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda akan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, yang pada akhirnya akan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Desentralisasi ini juga mengurangi sentralisasi kekuasaan yang sering kali memperburuk politik transaksional di tingkat pusat (Rodríguez-Pose, 2020).

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu dan pendanaan kampanye, yang menjadi bagian dari reformasi, juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa pemilu dilakukan dengan adil dan bahwa dana kampanye digunakan dengan transparan, kepercayaan mereka terhadap sistem politik akan meningkat. Hal ini pada gilirannya dapat memperkuat stabilitas politik dan memperbaiki partisipasi politik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik (Dahl, 2021).

5.2 Proyeksi Masa Depan Sistem Pemerintahan Indonesia

Reformasi yang diusulkan dalam penelitian ini akan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Jika langkah-langkah tersebut diimplementasikan dengan baik, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam hal pengelolaan demokrasi dan sistem pemerintahan yang inklusif.

Penerapan sistem pemilu yang lebih representatif akan menciptakan parlemen yang lebih seimbang dan beragam, di mana semua lapisan masyarakat memiliki suara yang sama. Reformasi ini juga diharapkan dapat memperkecil ketimpangan antara pusat dan daerah, sehingga mempercepat pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia (Rodríguez-Pose, 2020).

Dalam hal partai politik, reformasi yang dilakukan akan membuka jalan bagi munculnya partai-partai yang lebih inklusif dan berorientasi pada rakyat. Partai politik akan dipaksa untuk mengembangkan program-program yang lebih merespons kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan pada kepentingan politik semata. Selain itu, adanya pembatasan ketergantungan pada dana kampanye akan mengurangi pengaruh besar partai besar yang menguasai sumber daya, yang selama ini mendominasi pemilu dan pemerintahan (Smith, 2018).

Dengan terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan inklusif, Indonesia akan dapat mengurangi praktik politik transaksional yang selama ini merusak integritas pemerintahan. Pada akhirnya, sistem pemerintahan Indonesia akan lebih stabil, dapat dipercaya oleh rakyat, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik (Norris, 2020).

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dominasi politik dalam sistem pemerintahan Indonesia terjadi karena struktur kekuasaan yang terlalu terpusat pada partai-partai besar, lemahnya transparansi dalam pendanaan politik, serta



sistem pemilu yang masih memberi keuntungan bagi kelompok dengan sumber daya besar. Kondisi ini menyebabkan kebijakan publik sering kali lebih mencerminkan kepentingan partai daripada kebutuhan masyarakat luas. Faktor-faktor seperti politik transaksional, fragmentasi partai, dan rendahnya akuntabilitas pejabat publik memperkuat pengaruh politik terhadap jalannya pemerintahan. Akibatnya, prinsip demokrasi substantif—yang seharusnya menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik—belum sepenuhnya terwujud.

Untuk mengurangi pengaruh negatif dominasi politik tersebut, reformasi sistem partai politik dan tata kelola pemerintahan menjadi langkah yang tidak dapat ditunda. Reformasi harus diarahkan pada pembentukan sistem pemilu yang lebih representatif seperti *mixed-member proportional* (MMP), peningkatan transparansi dalam pendanaan politik, dan penguatan peran partai-partai kecil agar tercipta kompetisi politik yang sehat. Selain itu, desentralisasi kekuasaan perlu diperluas agar pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengambilan kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Dengan reformasi menyeluruh ini, Indonesia berpeluang mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, responsif, dan efisien, sekaligus menegakkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

6.2 Saran untuk Pemerintah dan Partai Politik

Berdasarkan hasil analisis dan kajian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan partai politik untuk mewujudkan sistem politik dan pemerintahan yang lebih baik:

1. Reformasi Sistem Pemilu

Salah satu langkah yang harus diambil adalah melakukan reformasi sistem pemilu yang lebih mencerminkan keinginan rakyat. Sistem *mixed-member proportional* (MMP) dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas representasi. MMP akan memastikan bahwa suara yang diberikan oleh pemilih tercermin secara proporsional dalam kursi legislatif, sambil memastikan bahwa daerah juga mendapatkan representasi yang layak (Norris, 2020).

2. Penguatan Sistem Partai Politik

Untuk mengurangi ketergantungan pada partai-partai besar, sistem partai politik di Indonesia perlu mengalami perubahan yang mendasar. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pendanaan partai politik. Pemerintah harus mengatur dengan ketat sumber dan penggunaan dana kampanye untuk memastikan bahwa partai politik kecil juga memiliki kesempatan untuk berkompetisi secara adil. Selain itu, partai politik harus didorong untuk meningkatkan akuntabilitas mereka terhadap publik (Gerrig, 2019).

3. Desentralisasi Kekuasaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Daerah

Pemberian lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya mereka sendiri dapat mempercepat proses pembangunan yang lebih merata. Dengan memberikan kewenangan lebih besar dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan sosial, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan daerah (Smith, 2018).

4. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil memegang peran penting dalam mendorong perubahan politik yang lebih baik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pembuatan kebijakan sangat diperlukan. Pemerintah dapat mendukung ini dengan menyediakan saluran yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka dan berperan serta dalam advokasi kebijakan (Mohan & Stokke, 2020).

5. Pendidikan Politik yang Lebih Inklusif

Selain reformasi sistem politik, penting untuk memperkenalkan pendidikan politik yang lebih inklusif di tingkat sekolah dan masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak politik mereka dan cara-cara berpartisipasi dalam proses politik, maka kualitas demokrasi Indonesia dapat ditingkatkan. Pendidikan politik juga harus mencakup



pengajaran tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan bagaimana memilih calon yang tepat berdasarkan kebijakan mereka (Finkel, 2021).

REFERENCES

- Budiarto, A. (2020). *Pengaruh politik terhadap kebijakan publik di Indonesia*. Jurnal Politik Indonesia, 15(2), 225-240.
- Choi, S., & Moon, C. (2020). *Political parties and governance in Asia: Comparative perspectives*. Routledge.
- Dahl, R. A. (2021). *On democracy*. Yale University Press.
- Dewi, F. (2017). *Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia: Struktur dan tantangan*. Pustaka Pelajar.
- Finkel, S. E. (2021). *Civic education and the future of democracy*. Cambridge University Press.
- Fischer, R. (2019). *Political reforms and democratic processes in emerging nations*. Springer.
- Gerring, J. (2019). *Party systems and democratic stability*. Cambridge University Press.
- Haque, M. S. (2019). *Decentralization and local governance in developing countries*. Palgrave Macmillan.
- Ibrahim, A. (2019). *Politik transaksional dan dampaknya terhadap kebijakan publik di Indonesia*. Jurnal Politik Indonesia, 14(2), 123-140.
- Levy, A., & Lewis, R. (2020). *Electoral systems and democracy in developing countries*. Cambridge University Press.
- Lijphart, A. (2021). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Michaels, D. (2020). *Political inequality and democratic governance*. Oxford University Press.
- Mohan, G., & Stokke, K. (2020). *The role of civil society in political reform*. Oxford University Press.
- Norris, P. (2020). *Electoral systems and political party strength*. Routledge.
- Pratama, M. (2020). *Hegemoni politik dan dampaknya terhadap hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Politik, 12(1), 45-63.
- Rahardjo, H. (2021). *Hukum dan politik di Indonesia: Tantangan menuju reformasi sistem pemerintahan yang lebih baik*. Pustaka Pelajar.
- Rahim, N. (2019). *The role of civil society in political reform: The case of Indonesia*. Political Studies Review, 17(3), 451-466.
- Rasyid, H. (2018). *Kekuasaan politik dan sistem pemerintahan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Reynolds, A. (2020). *Electoral systems and political party strength*. Routledge.
- Rodríguez-Pose, A. (2020). *Decentralization and regional development in Latin America*. Palgrave Macmillan.
- Setyawan, E. (2020). *Sistem pemilu dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia*. Jurnal Politik dan Demokrasi, 8(4), 50-67.
- Smith, G. (2018). *Local democracy and decentralization in Indonesia: Challenges and opportunities*. Springer.
- Suryanto, M. (2018). *Sistem multi-partai di Indonesia: Pengaruh dan tantangan*. Jurnal Ilmu Sosial, 10(1), 75-89.
- Tanuwidjaja, S. (2020). *Political party systems and electoral reforms in Southeast Asia*. Southeast Asian Studies Journal, 16(2), 112-127.